

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat (Syafrudin, 2021). Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah (Hartono & Ramdany, 2020).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Oleh sebab itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik (Wiratama & Andayani, 2022).

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya yaitu laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Murniati, 2021).

Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu *top management* dalam proses pengambilan keputusan (Rahayu, 2021). Pada sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Pembuatan laporan keuangan daerah adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas publik yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Seiring dengan adanya otonomi daerah, maka diberikan hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syafrudin (2021) mengatakan bahwa pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur antara

lainnya pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

Sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel (Rahayu, 2021).

Pertanggung jawaban keuangan yaitu sebagai upaya nyata dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan daerah yang hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (Murniati, 2021). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sudah seharusnya menjadi tugas pihak-pihak terkait upaya melaksanakan dan memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun,

walau Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat opini WTP namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus. Adapun catatan-catatan dari BPK seperti realisasi pendapatan yang belum tercapai dan adanya potensi pajak yang hilang. Rekapitulasi temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Temuan Pemeriksaan

No	Temuan
1	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang pada tahun 2020-2022.
2	Realisasi pajak dan retribusi yang belum tercapai/tidak mencapai target pada tahun 2020-2022.
3	Hasil penerimaan pajak dan retribusi yang tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama pada tahun 2020-2022 saat masih terjadi pandemi Covid 19.

Sumber: BPKP Jawa Tengah Tahun 2023.

Sorotan utama saat ini pada organisasi sektor publik di Indonesia adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Menurut Syafrudin (2021) dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Informasi pelaporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang

berkualitas (Yeni *et al.*, 2020). Menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah yang didalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah (Syafrudin, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2021) dan Ardiyansyah & Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka *et al* (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain pemanfaatan sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Utama (2021) penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar terwujudnya laporan keuangan yang akuntabilitas, transparansi dan dapat membantu pengelolaan data. Maka dari itu pemerintah membangun teknologi di bidang keuangan dan akuntansi yang disebut sebagai sistem informasi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2021) dan Yeni *et al* (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2021) menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman akuntansi. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, harus dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Yeni *et al* (2020) dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan, maka semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama & Andayani (2022) dan Yeni *et al* (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri *et al* (2019) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah transparansi. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya akuntabilitas publik dalam pengelolaannya sehingga dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas baik di pemerintah pusat maupun daerah (Murniati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2021) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2021) yang menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel penelitian yaitu pemahaman akuntansi dan transparansi. Dasar penambahan variabel pemahaman akuntansi karena seseorang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai benar tentang akuntansi (Puteri *et al.*, 2019). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berkualitas dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan selanjutnya yaitu penambahan variabel transparansi. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Rahayu, 2021). Perwujudan tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat yaitu dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik memilih judul:
“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)”

1.2. Ruang Lingkup

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan hanya menganalisis kualitas laporan keuangan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dengan demikian, ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern (X_1), sistem informasi keuangan daerah (X_2), pemahaman akuntansi (X_3) dan transparansi (X_4) sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
3. Penelitian dilakukan setelah proposal disetujui.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pihak yang lain sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah pengetahuan mereka seperti halnya peneliti.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Untuk memahami apakah kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah berjalan dengan baik, sehingga dapat mengetahui letak kecurangan-kecurangan dan bisa lebih waspada terhadap tindakan kecurangan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan daerah.

